

TRANSISI SAK ETAP KE SAK EP: TANTANGAN ATAU PELUANG BAGI BPR?

I Kadek Jonh Stiawan^{1*}

¹ jonhstiawan@gmail.com, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 14/11/2025

Revisi : 17/12/2025

Penerimaan : 05/01/2026

Kata Kunci:

Akuntansi Keuangan,
Standar Akuntansi, BPR

Keywords:

Financial Accounting,
Accounting Standards,
Rural Banks

DOI:

10.52859/jba.v13i1.856

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi BPR dalam proses transisi dari SAK ETAP ke SAK EP. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis melibatkan auditor internal, auditor eksternal, dan staf akuntansi yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan sebagai informan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan metode tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi ke SAK EP menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait kompleksitas standar, kebutuhan penyesuaian sistem dan prosedur internal, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Namun demikian, penerapan SAK EP juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kredibilitas laporan keuangan, serta mendorong peningkatan profesionalisme staf akuntansi. Dengan strategi adaptasi yang tepat, transisi ini berpotensi menjadi investasi jangka panjang bagi penguatan tata kelola dan keandalan pelaporan keuangan BPR.

ABSTRACT

This study aims to explore the challenges and opportunities faced by Rural Banks (BPR) in the transition from SAK ETAP to SAK EP. The research employs a qualitative approach with a phenomenological design, involving internal auditors, external auditors, and accounting staff directly engaged in the preparation of financial statements as informants. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that the transition to SAK EP presents several challenges, particularly related to the complexity of the standards, the

need to adjust internal systems and procedures, and limitations in human resource competencies. Nevertheless, the implementation of SAK EP also provides opportunities to enhance the quality, consistency, and credibility of financial reporting while promoting the professional development of accounting staff. With appropriate adaptation strategies, this transition can serve as a long-term investment in strengthening governance and the reliability of BPR's financial reporting.

Pendahuluan

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional tanpa menyediakan layanan lalu lintas pembayaran (Budiyaniti, 2018). Sebagai lembaga keuangan mikro, BPR memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat yang membutuhkan akses permodalan. Kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan BPR sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola serta transparansi pelaporan keuangan yang menjadi dasar evaluasi bagi pemilik, manajemen, dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama lebih dari satu dekade, BPR mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan, mengingat standar tersebut relatif sederhana dan sesuai dengan karakteristik BPR yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Namun, perkembangan lingkungan bisnis, meningkatnya kebutuhan transparansi, serta upaya harmonisasi standar pelaporan mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti SAK ETAP. SAK EP disusun untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi tetap menerbitkan laporan keuangan umum bagi pengguna eksternal, termasuk BPR (Maulana et al., 2023).

Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan Surat Edaran No. 21/SEOJK.03/2024 yang memuat Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR sebagai acuan resmi dalam proses transisi ke SAK EP. OJK juga

* Penulis Korespondensi: I Kadek Jonh Stiawan / jonhstiawan@gmail.com

mewajibkan seluruh BPR untuk menerapkan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan guna memastikan konsistensi, meningkatkan transparansi, serta mempermudah identifikasi komponen laporan keuangan yang berdampak pada kesehatan bank. Dengan penerapan standar baru ini, BPR dituntut untuk menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan agar selaras dengan ketentuan SAK EP.

Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP memunculkan dinamika baru dalam industri BPR. Pada satu sisi, SAK EP memberikan peluang bagi BPR untuk meningkatkan kualitas pelaporan melalui pengungkapan yang lebih komprehensif, pengukuran aset dan liabilitas yang lebih andal, serta penyajian informasi keuangan yang lebih relevan bagi regulator dan pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik, mendorong akuntabilitas kelembagaan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial maupun pengawasan (Mnahonin *et al.*, 2025).

Namun, di sisi lain, perubahan standar ini juga menghadirkan sejumlah tantangan. Banyak BPR menghadapi keterbatasan kapasitas SDM akuntansi yang belum sepenuhnya memahami standar baru. Kompleksitas pengungkapan dan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang lebih canggih menyebabkan beban tambahan, terutama bagi BPR kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Selain itu, ketidaksiapan infrastruktur dan kurangnya pelatihan komprehensif berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Lebih jauh, tuntutan pengawasan OJK yang semakin ketat mempertegas urgensi bagi BPR untuk beradaptasi dengan SAK EP. Ketidakmampuan mengikuti standar baru tidak hanya menimbulkan risiko administratif, tetapi juga berpotensi melemahkan reputasi dan kepercayaan publik. Kondisi ini menciptakan gap kesiapan antar-BPR, di mana BPR besar lebih cepat beradaptasi dibandingkan BPR kecil yang masih terkendala teknologi, biaya, dan kemampuan SDM.

SAK EP merupakan standar akuntansi baru yang diadaptasi dari *IFRS for SMEs* dengan penyesuaian terhadap konteks Indonesia dan ditetapkan sebagai pengganti SAK ETAP mulai 1 Januari 2025. Meskipun dirancang untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan, berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan BPR dalam mengimplementasikan standar ini masih rendah. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagian akuntansi dan teknologi informasi, yang belum sepenuhnya memahami konsep, pengukuran, dan pengungkapan dalam SAK EP. Standar baru yang lebih kompleks menuntut kapasitas teknis yang lebih tinggi, sehingga memerlukan pelatihan dan pendampingan intensif. Di sisi lain, Perbarindo menegaskan bahwa penerapan SAK EP tidak dapat dilakukan secara manual dan membutuhkan pembaruan *core banking system*.

Namun, banyak BPR belum memiliki infrastruktur sistem informasi yang memadai untuk mendukung proses tersebut. Selain itu, sosialisasi dan pemahaman mengenai SAK EP baik di lingkungan BPR maupun regulator dinilai belum merata. Pedoman Akuntansi (PA) BPR pun dilaporkan belum sepenuhnya siap dan masih memerlukan *stress test* sebelum diimplementasikan (antaranews.com, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi dan kesiapan operasional BPR. Dengan demikian, transisi dari SAK ETAP ke SAK EP bukan hanya perubahan standar, tetapi juga mencerminkan tantangan kelembagaan yang meliputi kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, dan kejelasan pedoman implementasi. Fenomena ini menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai kesiapan BPR dalam menghadapi transisi tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan SAK EP pada berbagai entitas, namun sebagian besar masih terbatas pada koperasi dan lembaga keuangan non-bank. Maulana *et al.* (2023) menemukan bahwa perubahan signifikan dalam penerapan SAK EP terutama terkait perlakuan akuntansi atas investasi pada entitas anak/asosiasi, imbalan kerja, imbalan pascakerja, serta pengakuan pajak

tanggungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa adopsi standar baru membawa konsekuensi langsung pada struktur dan kualitas laporan keuangan. Hasil serupa diperkuat oleh [Salman & Sutisna \(2025\)](#) yang menunjukkan bahwa implementasi SAK EP pada koperasi dapat meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan konsistensi pelaporan keuangan.

Namun, berbagai penelitian juga menyoroti kendala adopsi. [Lusiono et al. \(2024\)](#) menunjukkan bahwa banyak *Credit Union* belum memahami perubahan standar sehingga belum dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAK EP. Sementara itu, [Setiajatnika & Hidayat \(2025\)](#) menemukan bahwa tingkat kesiapan entitas untuk mengadopsi SAK EP masih rendah karena kompleksitas standar dan kebutuhan peningkatan kompetensi teknis. Secara lebih rinci, [Ramadan & Nisa \(2025\)](#) mengungkap bahwa transisi SAK ETAP ke SAK EP berdampak signifikan pada area pengakuan, klasifikasi, dan pengungkapan, khususnya terkait pendapatan, CKPN, aset tetap, dan imbalan pascakerja.

Berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa adopsi SAK EP bukan sekadar perubahan administratif, tetapi transformasi sistem pelaporan yang membutuhkan kesiapan struktur organisasi, teknologi, dan kompetensi SDM. SDM mencakup staf keuangan dan akuntansi yang berperan dalam melakukan pelaporan keuangan ([Setiya et al., 2025](#)). Namun, riset-riset tersebut belum menyentuh konteks Bank Perekonomian Rakyat (BPR), padahal BPR merupakan lembaga yang berada di bawah regulasi ketat OJK dan sangat bergantung pada kualitas pelaporan keuangan untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Selain itu, BPR menghadapi tantangan tambahan berupa kebutuhan penyesuaian *core banking system*, kesiapan pedoman akuntansi BPR, serta keterbatasan SDM.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada proses transisi penerapan SAK EP di sektor BPR sektor yang memiliki kompleksitas regulasi, kebutuhan pengawasan, serta tuntutan sistem informasi yang lebih tinggi dibandingkan UMKM maupun entitas privat lainnya. Kajian mendalam mengenai implementasi SAK EP pada BPR masih sangat terbatas di Indonesia, terutama karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek pemahaman standar atau kompetensi sumber daya manusia. Berbeda dari studi-studi terdahulu, penelitian ini mengintegrasikan tiga aspek utama yang menentukan keberhasilan implementasi SAK EP, yaitu kesiapan sumber daya manusia, kesiapan *core banking system*, serta kesiapan pedoman regulasi seperti PA BPR yang diterbitkan OJK. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap proses transisi standar.

Penelitian ini menambahkan nilai baru dengan mengidentifikasi variasi kesiapan antar-BPR dalam mengadopsi SAK EP, yang dipengaruhi oleh skala aset, kapasitas teknologi, dan kualitas SDM. BPR dengan sumber daya memadai lebih siap mengimplementasikan standar, sementara BPR skala kecil menghadapi keterbatasan, meningkatkan risiko ketidaksesuaian penerapan. Gap kesiapan ini berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas laporan keuangan antarbank, suatu aspek yang jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Temuan ini memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan peluang penerapan SAK EP di sektor BPR dan menjadi acuan bagi regulator dan manajemen dalam merancang strategi adaptasi untuk meningkatkan konsistensi, kualitas, dan kredibilitas pelaporan keuangan.

Telaah Literatur

Teori Akuntansi Keuangan

Teori akuntansi keuangan merupakan landasan konseptual utama dalam penyusunan laporan keuangan, yang mencakup prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Keberadaan standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman normatif untuk memastikan bahwa laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan serta digunakan secara efektif oleh para pemangku kepentingan dalam menilai

kondisi dan kinerja keuangan entitas (Setiajatnika & Hidayat, 2025). Akuntansi sebagai bahan bisnis yang didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya memainkan peran penting dalam sistem perekonomian (Ramadhan & Fitriana, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, *decision usefulness theory* menegaskan bahwa informasi akuntansi hanya memiliki nilai guna apabila informasi tersebut dipersepsikan relevan dan disajikan secara jujur serta andal. Apabila pengguna laporan keuangan meragukan relevansi atau keandalan informasi yang disajikan, maka informasi tersebut cenderung diabaikan dan tidak dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya karakteristik kualitatif informasi akuntansi, seperti keterpahaman, keterbandingan antarperiode dan antarentitas, ketepatan waktu penyajian, serta kemampuan informasi untuk diverifikasi. Karakteristik tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas dan kegunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan berbasis informasi (Kamotho *et al.*, 2022).

Lebih lanjut, teori institusional memberikan perspektif yang melengkapi pemahaman mengenai penerapan standar akuntansi dengan menekankan bahwa praktik dan struktur organisasi tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan efisiensi ekonomi semata, tetapi juga oleh tekanan lingkungan eksternal dan norma sosial yang berlaku (Maqdlilyan, 2022). Dalam kerangka ini, organisasi cenderung menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan praktik akuntansinya untuk memperoleh legitimasi dan penerimaan dari lingkungan institusional, termasuk regulator, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Kekuatan dan kematangan institusional sangat terkait dengan adopsi dan implementasi standar internasional IFRS dengan lembaga yang kuat mendorong transparansi dan sinyal pasar yang efektif (Muñoz *et al.*, 2025).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi. Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam dunia usaha karena berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi (Widyasari & Defin, 2025). Melalui laporan keuangan tersebut dapat diperoleh informasi mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut dapat disajikan sebagai dasar untuk menganalisa posisi keuangan tersebut, dimana hasil analisa tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengambil keputusan bagi pihak manajemen (Lijow *et al.*, 2021).

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan pada perusahaan sangat dibutuhkan oleh pihak internal ataupun eksternal untuk pengambilan keputusan (Apriada *et al.*, 2023). Penyusunan laporan keuangan merupakan menjadi tahapan penting dalam pelaporan informasi keuangan suatu entitas (Hariza *et al.*, 2025). Laporan ini menunjukkan sejarah perusahaan dalam nilai moneter. Informasi keuangan tentang kegiatan ekonomi perusahaan tidak hanya dicatat dalam siklus akuntansi, tetapi juga diolah dan diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang ditentukan (Saputra, 2022). Laporan keuangan disusun secara akrual berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna yang tidak hanya transaksi di masa lalu tetapi juga merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan (Wulandari *et al.*, 2023).

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Standar ini mengatur bagaimana transaksi dan kejadian ekonomi harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam

laporan keuangan (Muslimah, 2024). Dengan adanya SAK, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat dokumentasi internal, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi yang kredibel bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, regulator, dan pihak eksternal lainnya. Lebih jauh, penerapan SAK berbasis prinsip (*principle-based accounting*) mendorong perusahaan untuk menggunakan penilaian profesional (*professional judgement*) dalam menilai transaksi yang kompleks, sehingga kualitas informasi yang disajikan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

Standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP) merupakan standar akuntansi keuangan terbaru untuk entitas privat atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik penerbitan laporan keuangan. Standar akuntansi menggunakan SAK EP yang disahkan oleh ikatan akuntansi indonesia (IAI) dan mulai diterapkan pada tanggal 1 januari 2025. IAI menerbitkan standar akuntansi ini untuk kemudahan dalam membuat laporan keuangan (Mnahonin *et al.*, 2025). Secara umum, SAK EP lebih sederhana dari pada SAK umum berbasis IFRS.

SAK EP menghilangkan topik-topik yang tidak relevan bagi entitas swasta, seperti laba per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi. Penyederhanaan lain juga terjadi pada pilihan kebijakan akuntansi, sehingga entitas swasta mengikuti satu kebijakan akuntansi tunggal untuk transaksi tertentu. Penyederhanaan yang terakhir ini mencakup beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran, pengungkapan yang lebih sedikit, dan bahasa yang lebih sederhana (Pranesti & Hanani, 2022). Komponen laporan keuangan menurut SAK EP yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif atau laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Widyasari & Defin, 2025).

Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Berdasarkan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dijelaskan bahwa Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. BPR berfokus pada penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, serta penyaluran kredit terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat lokal. Siaran pers dari OJK menyebut bahwa POJK 7/2024 merupakan instrumen kebijakan untuk memperkuat BPR sebagai lembaga keuangan mikro yang adaptif, berdaya saing, serta mampu memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM di wilayah lokal. Selain itu, regulasi ini juga menegaskan bahwa BPR harus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk memahami secara mendalam pengalaman dan tantangan BPR dalam transisi dari SAK ETAP ke SAK EP. Informan yang digunakan pada penelitian ini dipilih sebanyak tiga orang yang terdiri dari satu orang auditor internal, satu orang auditor eksternal, dan satu orang staf akuntansi BPR yang terlibat langsung dalam proses pelaporan keuangan. Pemilihan informan didasarkan pada peran masing-masing pihak, di mana staf akuntansi bertanggung jawab atas penerapan standar dan penyusunan laporan, auditor internal melakukan pengawasan dan evaluasi kepatuhan, serta auditor eksternal menilai kewajaran laporan keuangan secara independen. Kombinasi ketiga informan ini memungkinkan diperolehnya pandangan yang komprehensif mengenai penerapan SAK EP.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi informan selama proses transisi standar akuntansi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup proses kondensasi data untuk mereduksi dan memilah informasi penting, penyajian data dalam bentuk tema-tema utama terkait kesiapan SDM, kesiapan *core banking system*, dan pemahaman pedoman OJK, serta penarikan kesimpulan melalui interpretasi pola dan verifikasi temuan menggunakan *member checking* dan triangulasi sumber agar hasil penelitian tetap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kesiapan Internal BPR dalam Transisi Standar Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BPR berada pada tahap adaptasi awal terhadap SAK EP. Kendati demikian, terdapat variasi pemahaman antar unit, terutama pada staf akuntansi dan auditor internal. SAK EP dianggap lebih rinci dan menuntut *judgement* profesional yang lebih kuat dibandingkan SAK ETAP yang relatif sederhana. Seorang staf akuntansi BPR X (Ibu KM) menyampaikan bahwa pemahaman staf masih belum merata dengan kutipan wawancara berikut.

"... kalo jujur dari sisi akuntansi, kami masih terus menyesuaikan. SAK EP itu lebih detail. Kadang kami masih balik lagi ke contoh-contoh kasus untuk memastikan pencatatannya sudah sesuai".

Pernyataan Ibu KM menunjukkan bahwa mereka sedang menyesuaikan diri dengan standar yang baru. SAK EP lebih kompleks dibanding SAK ETAP karena menuntut penilaian profesional yang lebih tinggi dalam pencatatan dan pengungkapan transaksi. Oleh karena itu, staf sering kembali memeriksa contoh kasus sebagai panduan agar pencatatan tetap akurat dan sesuai standar. Senada dengan itu, auditor internal pada BPR Y (Ibu SA) juga mengakui adanya gap kompetensi teknis dalam membaca dan menginterpretasikan standar baru dengan kutipan wawancara berikut.

"... kami sudah ikut beberapa pelatihan, *tapi* ketika masuk ke praktik, tetap ada bingungnya. Terutama bagian estimasi dan *fair value*, itu *kan* tidak biasa kami lakukan waktu SAK ETAP".

Meskipun staf akuntansi dan auditor internal telah mendapatkan pelatihan, penerapan SAK EP tetap menuntut adaptasi praktis yang lebih kompleks. Hal ini terjadi karena SAK EP memperkenalkan konsep-konsep seperti estimasi dan penilaian *fair value*, yang sebelumnya tidak diterapkan dalam SAK ETAP. Dengan kata lain, pelatihan formal saja tidak selalu cukup, staf perlu pengalaman langsung untuk memahami penerapan prinsip-prinsip baru ini dalam konteks transaksi nyata. Fenomena ini menekankan pentingnya pendalaman praktik dan pengalaman sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap standar akuntansi yang lebih berbasis prinsip dan *judgement* profesional. Meskipun terdapat keterbatasan awal, manajemen BPR umumnya menilai transisi ini sebagai proses pembelajaran yang tidak bisa dihindari, terutama karena tuntutan regulasi dan kebutuhan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tantangan dalam Implementasi SAK EP

Kompleksitas SAK EP menjadi tantangan terbesar karena memerlukan pemahaman analitis yang lebih mendalam. Auditor eksternal (Bapak JS) menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

"... BPR harus sadar bahwa SAK EP itu levelnya lebih tinggi dari ETAP. Ada unsur *judgement* yang tidak bisa sekadar *copy-paste* dari laporan tahun sebelumnya. Banyak klien BPR kami yang masih butuh pendampingan untuk itu".

SAK EP menuntut penerapan prinsip akuntansi yang lebih kompleks dibanding SAK ETAP. Standar ini tidak hanya mengatur format laporan, tetapi juga membutuhkan penilaian profesional dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi. Oleh karena itu, BPR tidak bisa sekadar meniru

laporan tahun sebelumnya; mereka membutuhkan pendampingan dan bimbingan dari auditor untuk memastikan penerapan standar sesuai prinsip yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi ke SAK EP merupakan proses adaptasi yang membutuhkan kombinasi pemahaman konseptual dan praktik teknis secara simultan. Perubahan standar memengaruhi alur kerja, terutama pada bagian akuntansi yang harus menyesuaikan sistem pencatatan, format laporan, serta prosedur pendukung. Staf akunting BPR X (Ibu KM) menambahkan dengan pernyataan sebagai berikut.

"... yang terasa berat itu penyesuaian sistem. Format laporan berubah, beberapa akun harus *mapping* ulang. Jadi kerjaan ekstra selama dua sampai tiga bulan awal".

Transisi ke SAK EP tidak hanya menuntut pemahaman standar baru, tetapi juga penyesuaian teknis pada sistem dan prosedur akuntansi. Perubahan format laporan dan kebutuhan untuk memetakan ulang akun menimbulkan beban kerja tambahan pada staf akuntansi, terutama pada fase awal implementasi. Hal ini mencerminkan bahwa adaptasi standar baru melibatkan dua aspek yakni pemahaman konseptual dan perubahan proses operasional, yang keduanya harus berjalan bersamaan agar laporan keuangan sesuai dengan prinsip SAK EP. Fenomena ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa implementasi standar baru sering menuntut penyesuaian sistem informasi dan alur kerja agar praktik akuntansi tetap efektif dan akurat. Auditor internal pada BPR Y (Ibu SA) memperkuat temuan tersebut dengan pernyataan sebagai berikut.

"... kami harus revisi SOP juga. Audit program berubah karena risiko pelaporannya berbeda. Jadi *ya*, banyak dokumen yang harus dipastikan konsisten".

Penerapan SAK EP menuntut penyesuaian prosedur internal dan program audit. Standar baru mengubah karakteristik risiko pelaporan, sehingga dokumen dan prosedur yang sebelumnya cukup untuk SAK ETAP perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip SAK EP. Hal ini mencerminkan bahwa transisi standar bukan sekadar perubahan format laporan, tetapi juga melibatkan penataan ulang alur kerja dan kontrol internal untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi keuangan. Fenomena ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa adopsi standar baru sering memerlukan revisi SOP dan program audit agar manajemen risiko dan kepatuhan tetap terjaga.

Peluang dari Implementasi SAK EP

Meskipun menghadapi tantangan, sebagian informan menyadari bahwa penerapan SAK EP membuka peluang signifikan bagi BPR, terutama dari aspek kredibilitas laporan keuangan, efisiensi proses, dan penguatan tata kelola. Auditor internal menilai bahwa transisi ke SAK EP membantu memperbaiki disiplin dokumentasi dan akurasi pencatatan.

"... sebelumnya di SAK ETAP ada beberapa area yang bisa *dibilang* bebas interpretasi, sekarang lebih jelas. Jadi kami merasa kualitas laporannya naik".

Penerapan SAK EP meningkatkan kepastian dan konsistensi pelaporan keuangan. SAK ETAP relatif lebih sederhana dan memberikan ruang interpretasi yang luas, sedangkan SAK EP lebih rinci dan berbasis prinsip, sehingga mengurangi ambiguitas dalam pencatatan dan pengungkapan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan, karena informasi yang disajikan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh auditor maupun pemangku kepentingan. Fenomena ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa standar akuntansi berbasis prinsip (*principle-based*) cenderung memperkuat integritas laporan dan memperkecil risiko salah saji. Auditor eksternal melihat bahwa SAK EP membawa BPR lebih dekat pada praktik pelaporan keuangan umum, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

"... dari sisi kami, BPR yang sudah adopsi SAK EP itu terlihat lebih siap dan lebih kredibel. Regulator juga biasanya lebih yakin karena standarnya lebih komprehensif".

Penerapan SAK EP meningkatkan reputasi dan kredibilitas BPR di mata auditor dan regulator. Standar yang lebih komprehensif dan berbasis prinsip membuat laporan keuangan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan. Fenomena ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa adopsi standar akuntansi yang lebih ketat dan rinci berpotensi memperkuat keyakinan pengguna laporan keuangan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Staf *accounting* BPR X (Ibu KM) merasakan bahwa proses ini meningkatkan kompetensi teknis tim.

"... walaupun awalnya berat, *tapi* kami jadi belajar hal baru. Sekarang kami lebih terbiasa baca standar dan cari referensi, tidak *cuma* tunggu instruksi".

Transisi ke SAK EP mendorong pengembangan kompetensi dan kemandirian staf akuntansi. Proses adaptasi terhadap standar yang lebih kompleks menuntut staf untuk aktif membaca dan memahami prinsip-prinsip baru, bukan hanya mengikuti instruksi secara mekanis. Hal ini mencerminkan adanya pembelajaran berkelanjutan di lingkungan kerja, di mana pengalaman langsung membantu staf meningkatkan pemahaman teknis dan kemampuan mengambil keputusan profesional.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada BPR merupakan proses adaptasi yang kompleks dan multidimensional, yang dapat dipahami melalui perspektif teori akuntansi keuangan, khususnya *decision usefulness theory*, *principle-based accounting*, dan teori institusional. Transisi ini tidak hanya mencerminkan perubahan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan dinamika penyesuaian organisasi terhadap standar akuntansi yang lebih berbasis prinsip dan tuntutan lingkungan institusional.

Secara internal, BPR berada pada tahap awal penyesuaian institusional yang ditandai oleh belum meratanya tingkat pemahaman terhadap SAK EP antar unit organisasi, terutama antara staf akuntansi dan auditor internal. Ketidaksamaan pemahaman tersebut mencerminkan adanya *knowledge gap* dalam proses adopsi standar akuntansi baru. Dalam perspektif *decision usefulness theory*, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas kegunaan informasi akuntansi. Perbedaan pemahaman dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi meningkatkan risiko inkonsistensi penerapan, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi kurang relevan, kurang andal, atau sulit dibandingkan. Akibatnya, fungsi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dapat melemah.

Lebih lanjut, *decision usefulness theory* menegaskan bahwa informasi akuntansi harus mampu merepresentasikan substansi ekonomi transaksi secara jujur (*faithful representation*) agar memberikan manfaat optimal bagi pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, penerapan SAK EP sebagai standar berbasis prinsip (*principle-based accounting*) menuntut tingkat *professional judgment* yang lebih tinggi, baik dalam penentuan kebijakan akuntansi, penilaian estimasi, maupun pengungkapan informasi material. Apabila kompetensi dan pemahaman terhadap prinsip akuntansi belum memadai, maka risiko terjadinya penurunan kualitas *faithful representation* akan meningkat yang pada akhirnya mengurangi kegunaan informasi akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan (Fijabi & Ahsannaya, 2025).

Oleh karena itu, adaptasi terhadap SAK EP tidak dapat dipahami sekadar sebagai perubahan teknis atau format pelaporan, melainkan sebagai pergeseran paradigma akuntansi menuju pendekatan yang lebih menekankan substansi ekonomi transaksi dibandingkan bentuk hukumnya. Pergeseran ini sejalan dengan tujuan utama teori kegunaan akuntansi, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan

bermakna bagi pengguna laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi, seperti keterpahaman, keterbandingan antar periode dan antar entitas, ketepatan waktu, serta verifiabilitas, menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan nilai guna informasi akuntansi (Kamotho *et al.*, 2022). Dengan demikian, keberhasilan implementasi SAK EP sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam memperkecil *knowledge gap* dan memperkuat kapasitas profesional sumber daya manusia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Ramadan & Nisa (2025) yang menyatakan bahwa transisi ke SAK EP tidak hanya menyangkut perubahan format laporan, tetapi juga mencakup pergeseran mendasar dalam prinsip akuntansi, seperti peralihan dari *cash basis* ke *accrual basis*, penerapan model pengakuan pendapatan lima langkah, pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang (CKPN), imbalan pascakerja, serta pajak tangguhan. Maulana *et al.* (2023) juga menegaskan bahwa penerapan SAK EP membawa perubahan signifikan dalam perlakuan akuntansi, khususnya terkait investasi pada entitas anak dan asosiasi, imbalan kerja, imbalan pascakerja, serta pengakuan pajak tangguhan. Sementara itu, Tanjung *et al.* (2025) menemukan bahwa BPRS dalam penelitiannya telah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EP. Sebaliknya, Pranesti & Hanani (2022) menunjukkan bahwa BUMD masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan kesiapan sumber daya dalam mengadopsi SAK EP, sehingga memerlukan waktu adaptasi yang lebih panjang.

Dari sisi tantangan, kompleksitas standar muncul sebagai faktor dominan yang memengaruhi proses implementasi. Dalam perspektif teori sistem akuntansi, penerapan SAK EP menuntut penyesuaian menyeluruh terhadap alur kerja, peta akun, sistem informasi akuntansi, serta prosedur operasional standar. Proses penyesuaian ini menimbulkan beban kerja tambahan bagi staf pada fase awal transisi dan mengharuskan organisasi melakukan revisi SOP serta program audit untuk menyesuaikan profil risiko pelaporan yang berbeda dibandingkan SAK ETAP. Temuan ini menegaskan bahwa standar berbasis prinsip tidak dapat diimplementasikan secara efektif tanpa dukungan sistem pengendalian internal yang memadai, sebagaimana ditegaskan dalam teori kualitas pelaporan keuangan. Junaidi *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam memastikan penerapan standar akuntansi mampu menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Selain itu, penelitian yang mengkaji penerapan IFRS juga menyoroti kebutuhan pelatihan dan kualitas audit sebagai tantangan utama dalam mengelola kompleksitas standar berbasis prinsip (Judijanto & Junaidi, 2024).

Di sisi lain, transisi ke SAK EP juga membuka peluang strategis bagi BPR. Standar yang lebih komprehensif dan konsisten secara konseptual berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengurangan risiko salah saji dan peningkatan keterbandingan antar periode. Dalam kerangka *decision usefulness theory*, peningkatan kualitas tersebut memperkuat nilai informasi akuntansi bagi pengguna laporan keuangan. Selain itu, penerapan SAK EP berkontribusi pada peningkatan legitimasi dan kredibilitas BPR di mata auditor dan regulator, sejalan dengan teori institusional yang memandang adopsi standar akuntansi sebagai sarana untuk memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari lingkungan eksternal. Implementasi SAK EP juga mendorong pengembangan kompetensi dan kemandirian profesional staf akuntansi melalui proses *continuous learning* dan penguatan kemampuan pengambilan keputusan berbasis pertimbangan profesional, sebagaimana ditegaskan oleh (Hanun *et al.*, 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP merupakan proses yang menantang sekaligus strategis bagi BPR. Tantangan yang berkaitan dengan kompleksitas standar, penyesuaian sistem, dan kapasitas sumber daya manusia perlu dikelola secara sistematis melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan auditor, serta penyempurnaan prosedur internal. Pada saat yang sama, peluang berupa peningkatan kualitas pelaporan, penguatan kredibilitas, dan pengembangan profesionalisme staf menunjukkan bahwa penerapan SAK EP layak diposisikan

sebagai investasi jangka panjang dalam memperkuat tata kelola, integritas, dan keandalan laporan keuangan BPR.

Simpulan

Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada BPR merupakan proses yang kompleks, terutama karena tuntutan pemahaman standar yang lebih rinci, penyesuaian sistem dan prosedur, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Namun demikian, penerapan SAK EP juga membuka peluang strategis berupa peningkatan kualitas dan konsistensi laporan keuangan, penguatan kredibilitas di mata auditor dan regulator, serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme staf akuntansi. Dengan dukungan strategi adaptasi yang tepat, seperti pelatihan berkelanjutan, pendampingan auditor, dan penyesuaian prosedur internal, transisi ini dapat menjadi investasi jangka panjang dalam memperkuat tata kelola dan keandalan pelaporan keuangan BPR.

Referensi

- Apriada, K., Wulandari, P. R., & Hartini, M. L. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Badung. *Jurnal Economina*, 2(8), 2178–2192. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.749>
- Budiyanti, E. (2018). Peran Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Perekonomian di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 23(2), 143–154. <http://economicreviewnews>.
- Fijabi, L. K., & Ahsannaya, C. (2025). ETHICAL PRACTICES AND FINANCIAL REPORTING QUALITY OF SELECTED DEPOSIT MONEY BANKS IN LAGOS STATE , NIGERIA. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 4(2), 146–160.
- Hanun, J., Widiawati, H. S., & Kurniawan, A. (2025). Peran Standar Akuntansi, Sistem Informasi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 53–60.
- Hariza, R., Rahmadi, R., & Fahrudin, T. (2025). Penerapan SAK ETAP sebagai Strategi Peningkatan Transparansi Laporan Keuangan. *Al Dzahab*, 6(2), 191–199. <https://doi.org/10.32939/dhb.v6i2.5834>
- Judijanto, L., & Junaidi, A. (2024). The Effect of International Accounting Standards Implementation, Accountant Training, and Audit Quality on the Reliability of Financial Statements in Public Companies in Indonesia. *West Science Accounting and Finance*, 2(03), 607–617. <https://doi.org/10.58812/wsaf.v2i03.1435>
- Junaidi, J., Ridwan, R., & BZ, F. S. (2022). The Impact of Financial Accounting Standard Implementation and Internal Control Structure on Financial Report Quality and Annual Member Meetings. *International Journal of Finance, Economics and Business*, 1(2), 132–140. <https://doi.org/10.56225/ijfeb.v1i2.28>
- Kamotho, D. W., Moloi, T. S., & Halleen, S. (2022). Assessing the Decision Usefulness of Integrated Reports of Namibian Listed Companies. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/jrfm15090383>
- Lijow, T. F., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 139–147. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33284>
- Lusiono, E. F., Raviani, B., & Sentiya, N. (2024). PENYUSUNAN SAK ENTITAS PRIVAT PADA KOPERASI (Studi Kasus Credit Union Sari Intugin). *Jurnal Research, Management, and Business*, 1(1), 1–9.
- Maqdllyan, R. (2022). Determinan Implementasi Akuntansi Akrua Terhadap Akuntabilitas Sektor Publik: Pendekatan Teori Institusional. *Jwm (Jurnal Wawasan Manajemen)*, 10(3), 198–203. <https://doi.org/10.20527/jwm.v10i3.218>
- Maulana, J., Marismiati, M., & Wirakanda, G. (2023). Analisis Penerapan Sak Entitas Privat (Sak Ep) Pada

- Laporan Keuangan Koperasi Xyz. *Land Journal*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985>
- Mnahonin, D. A., Susilawati, M., & Ndun, A. S. (2025). ANALISIS AKUNTANSI KEPERILAKUAN KARYAWAN BAGIAN AKUNTANSI TERHADAP PENERAPAN SAK EP PADA PT. BPR TANA OBA LAIS MANEKAT KOTA KUPANG. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 22(9), 1–14. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Muñoz, R. I. G., Rodríguez, Y. E., & Maldonado, S. (2025). Explaining the Determinants of International Financial Reporting Standard (IFRS) Disclosure: Evidence from Latin American Countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(10), 1–32. <https://doi.org/10.3390/jrfm18100567>
- Muslimah, L. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 918–923. <https://doi.org/10.47233/jebis.v4i5.2021>
- Pranesti, A., & Hanani, T. (2022). Company Readiness in Applying Private Entity Financial Accounting Standards (Sak Ep): a Case Study of Regional Owned Enterprises (Bumd) in Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 122–129. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v3i2.590>
- Ramadan, W. R., & Nisa, F. (2025). Analisis Dampak Transisi Dari SAK ETAP Ke SAK EP Terhadap Laporan Keuangan Dan Implikasinya Pada Perpajakan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 708–721. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5948>
- Ramadhan, W. D., & Fitriana, A. V. (2023). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PIUTANG PADA KOPERASI KONVENSIIONAL DI KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 418–431. <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v10i2>
- Salman, K. R., & Sutisna, E. (2025). Implementasi SAK Entitas Privat (SAK EP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2024. *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 18–25.
- Saputra, D. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Simpan Pinjam Sorek Maju Bersama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 33(2), 12–22. [https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol34\(1\).10981](https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol34(1).10981)
- Setiajatnika, E., & Hidayat, U. (2025). *Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi*. 1(2), 177–188.
- Setiya, T., Hamzah, A. P., & Kodirin, K. (2025). Kesiapan Bum Desma Lkd Perintis Di Serang Dalam Implementasi Panduan Laporan Keuangan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(2), 141–152. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i2.772>
- Tanjung, N. K., Syafina, L., & ... (2025). Analysis of the Implementation of Private Entity Financial Accounting Standards in the Presentation of Financial Statements of PT BPRS Puduarta Insani. *Amkop Management ...*, 5(2), 682–696. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.3047>
- Widyasari, & Defin, A. E. (2025). Penerapan S AK Entitas Privat u ntuk Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Pustaka Mitra*, 5(5), 270–274.
- Wulandari, T., Saputri, N. A. A., Laili, R. F. N., Fitriani, S. N., & Mustoffa, A. F. (2023). PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO 23. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 257–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v10i1>